

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2006

3.1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3.1.1 Kondisi Umum

Situasi pembangunan manusia sebagai tujuan tertinggi pembangunan Kabupaten Garut dapat dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini cukup komprehensif dalam mengindikasikan dampak pembangunan dari aspek kesehatan, pengetahuan dan kesejahteraan ekonomi. IPM Kabupaten Garut pada tahun 2004 (data BPS Kabupaten Garut, April 2005) sebesar 66,31 %, atau termasuk kelompok wilayah dengan tingkat kesejahteraan 'sedang atas', yaitu antara 66%-80%. Angka ini telah mengalami peningkatan dari 65,59% pada tahun 2002. Dibandingkan dengan kabupaten lain di propinsi Jawa Barat, IPM Kabupaten Garut masih tergolong rendah. Hal ini penting mendapatkan perhatian dalam gerak langkah pembangunan.

3.1.2 Isue strategis

Memperhatikan kondisi umum pembangunan Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2004 dalam kaitannya dengan misi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian tahun 2006, yaitu :

1. Kualitas SDM yang diukur dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia masih jauh tertinggal dengan kabupaten lainnya di Jawa Barat
2. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan secara lebih merata, berkualitas dan terjangkau.
3. Masih rendahnya kualitas kesehatan penduduk, sementara sumber pembiayaan kesehatan masih sangat terbatas dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.
4. Masih tingginya angka kenaikan jumlah penduduk secara absolut yang menyebabkan semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
5. Pembangunan agama masih dihadapkan pada gejala negatif, seperti praktek perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian narkoba.
6. Belum fokusnya kegiatan litbang, sehingga belum dapat mencapai hasil yang signifikan. Selain itu kebijakan inovasi yang mencakup bidang pendidikan, industri dan iptek belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, macetnya sistem transaksi dan belum tumbuhnya sisi pengguna iptek domestik.

3.1.3 Sasaran

1. Tercapainya IPM Kabupaten Garut Tahun 2006 sebesar 68,03 poin
2. Terjaminnya ketersediaan, mutu pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan.
3. Meningkatnya umur harapan hidup;
4. Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan
5. Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita;
6. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk ;
7. Menurunnya tingkat fertilitas;
8. Meningkatnya pelayanan bagi pasangan usia subur;
9. Meningkatnya penggunaan metoda kontrasepsi yang efektif dan efisien;
10. Meningkatnya usia perkawinan pertama bagi perempuan;
11. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak;
12. Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif;
13. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana.
14. Meningkatnya pendidikan pada usia balita dan tersedianya Sanggar-Sanggar Belajar bagi anak balita
15. Tersebarinya Taman Kanak-Kanak di setiap desa
16. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APM, APK, APS)
17. Meningkatnya lama pendidikan dan penanggulangan "Drop Out" (DO)
18. Meningkatnya masyarakat yang melek huruf
19. Tercukupinya tenaga pendidikan dengan kualitas dan kesejahteraan yang semakin baik
20. Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, khususnya bagi keluarga miskin.
21. Meningkatnya APK, SMU, SMK dan MA;
22. Memperkenalkan konsep pembentukan Dewan Sekolah atau Komite Sekolah pada sebagian SD, MI serta SLTP dan MTs
23. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup guna meningkatkan kualitas hidupnya.
24. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan.
25. Tersedianya standar pelayanan minimal pendidikan.
26. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar
27. Meningkatkan proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik.
28. Meningkatnya partisipasi penduduk pada pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal
29. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan
30. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme aparat pemerintah.
31. Terciptanya kesadaran aparatur sebagai pelayanan masyarakat daerah yang berdedikasi, kreatif, inovatif, dan berbudi pekerti yang baik.
32. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.
33. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

34. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya
35. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
36. Pengembangan kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
37. Pengelolaan sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional;
38. Dukungan peraturan perundang-undangan yang sinkron dan harmonis;
39. Terciptanya dan terselenggaranya produk hukum (Perda) yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna).
40. Terciptanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dalam perancangan produk hukum daerah.
41. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan.

3.1.4 Arah Kebijakan

1. Peningkatan jumlah, mutu obat dan perbekalan kesehatan;
2. Peningkatan efisiensi dan rasionalisasi penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
3. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama bagi penduduk miskin;
4. Peningkatan mutu pelayanan farmasi
5. Peningkatan jumlah dan kualitas Puskesmas;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis
7. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;
8. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
9. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini;
10. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.
11. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk;
12. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan keluarga yang lebih baik;
13. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB
14. Memberdayakan ekonomi keluarga pra KS dan KSI melalui peran serta kaum ibu
15. Meningkatkan sarana Taman Kanak-Kanak di setiap desa
16. Meningkatkan pendidikan bagi usia dini di Sanggar-Sanggar Belajar
17. Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
18. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas;
19. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil, ataupun masyarakat penyandang cacat;
20. Meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan ataupun pendidikan non formal yang bermutu;
21. Meningkatkan pendidikan non formal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak

mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;

22. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya;
23. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen APBD.
24. Penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah/masyarakat;
25. Meningkatkan kinerja guru disertai peningkatan kesejahteraannya;
26. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan budi pekerti;
27. Meningkatkan wajar Dikdas 9 Tahun.
28. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi
29. Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal
30. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
31. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung upaya mensukseskan wajar Dikdas 9 tahun.
32. Mewujudkan kemudahan pelayanan informasi pembangunan daerah
33. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN
34. Meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Kabupaten Garut melalui pengelolaan sumberdaya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan kompetensi
35. Menata kelembagaan pemerintahan Kabupaten Garut yang efisien dan efektif, dan menata hubungan kerja antara eksekutif (Pemerintah Kabupaten Garut) dan legislatif (DPRD Kabupaten Garut)
36. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
37. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk hukum daerah selaras dengan perkembangan pembangunan, pemerintah dan masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.
38. Terciptanya informasi yang akurat dan tertatanya produk hukum pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sebagai bahan informasi hukum.
39. Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat
40. Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab dari seluruh kelembagaan pemerintahan yang berdasarkan mekanisme *checks and balance*.
41. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah.
42. Meningkatkan kualitas administrasi penyuluhan kependudukan

43. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

3.2 Mengurangi Disparitas Pembangunan Garut Selatan dengan Utara dan Tengah

3.2.1 Kondisi Umum

Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis, secara topografi mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di puncak gunung. Akibat pengaruh adanya daerah pegunungan, daerah aliran sungai dan daerah dataran rendah pantai, maka tingkat kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun potensi serta permasalahan yang dimilikinya juga bervariasi.

Berdasarkan Laporan Akhir RTRW Kabupaten Garut tahun 2001-2010, wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi 3 (tiga) orde yaitu :

- a. Orde I merupakan pusat utama dari seluruh kegiatan di Kabupaten Garut yang meliputi Kecamatan Garut Kota dan Tarogong.
- b. Orde II merupakan daerah yang memiliki sub pusat pengembangan yang tidak dapat dijangkau oleh orde pertama secara langsung. Unit wilayah ini dapat dijadikan simpul koleksi dan distribusi di tingkat lokal. Wilayah ini meliputi Kecamatan Cikajang, Pameungpeuk, Cibatuan, Malangbong, dan Bungbulang.
- c. Orde III merupakan pusat pertumbuhan bagi daerah belakang yang mempunyai fungsi sebagai penggerak pertumbuhan. Unit wilayah ini tidak dapat dijadikan simpul koleksi dan distribusi lokal, akan tetapi basis pertumbuhan masih dipengaruhi oleh wilayah inti dan pendukung.

Secara makro Kabupaten Garut merupakan wilayah dengan keterkaitan eksternal yang relatif tinggi. Oleh karena itu perlu diperhatikan perwujudan interaksi antara Kabupaten Garut dengan wilayah lain secara lebih optimal. Aspek dasar yang menjadi pertimbangan adalah :

1. Jaringan regional Bandung–Ciamis (dan seterusnya) yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah utara Kabupaten Garut
2. Adanya interaksi Kabupaten Garut dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya terutama Kabupaten Bandung, Tasikmalaya dan Sumedang
3. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mengembangkan budidaya komoditi yang sifatnya kompetitif dengan wilayah lain.

Sedangkan secara mikro pertimbangan internal lebih menekankan pada usaha pemerataan perkembangan antar sub-wilayah (misal wilayah utara dan selatan) yang simultan dan terpeliharanya daya dukung lingkungan serta stabilitas internal wilayah. Aspek dasar yang menjadi pertimbangan adalah :

1. Pengembangan tata ruang mikro harus dapat menjawab tantangan isu kesenjangan wilayah antara wilayah yang lebih berkembang (bagian utara) dengan wilayah yang relatif kurang berkembang (bagian Selatan).
2. Perlunya pemantapan fungsi lindung kawasan-kawasan yang memiliki kriteria kawasan lindung

3. Memperhatikan hirarki pusat-pusat permukiman dan lingkup pelayanannya

Disamping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, pembangunan daerah dihadapkan pada permasalahan pokok berupa meningkatnya kesenjangan wilayah antara wilayah utara-tengah dan selatan, serta antara wilayah kota–desa. Disamping itu, kemampuan masing-masing daerah tidak merata dalam kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan maupun sarana prasarana.

3.2.2 Isue strategis

1. Pembangunan wilayah di Kabupaten Garut dihadapkan pada masalah pokok terjadinya kesenjangan antara Garut Tengah, Utara dan Selatan serta antara kota dan desa. Sementara itu pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dihadapkan pada kurangnya kesiapan dalam memanfaatkan peluang yang ada, terbatasnya sumberdaya manusia, rendahnya peranan swasta dalam pembangunan serta terbatasnya jaringan sarana dan prasarana fisik dan ekonomi di daerah.
2. Pembangunan infrastruktur masih banyak dihadapkan pada berbagai kendala, sehingga dukungan infrastruktur bagi pembangunan secara regional masih lemah. Kondisi infrastruktur jalan masih kritis akibat kurangnya dana rehabilitasi dan pemeliharaan, seringkali terjadi bencana alam dan memburuknya kualitas konstruksi jalan. Demikian pula infrastruktur lainnya seperti listrik, energi dan telekomunikasi
3. Penyediaan infrastruktur terkait dengan pendayagunaan sumberdaya air terutama untuk penyediaan air irigasi masih memerlukan perhatian besar.
4. Upaya pemekaran wilayah (kecamatan dan desa) belum sepenuhnya mampu meningkatkan dan mempercepat pembangunan wilayah
5. Ketersediaan air minum di perkotaan dan pedesaan masih rendah

3.2.3 Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
2. Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah serta peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah.
3. Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.
4. Meningkatnya pelayanan informasi tentang transmigrasi
5. Meningkatnya pelayanan informasi tentang sosial
6. Memelihara kualitas jalan/ jembatan yang kondisinya rusak ringan sehingga tetap berfungsi sebagai prasarana mobilitas kegiatan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas jalan/ jembatan kabupaten yang telah dipelihara secara rutin.
8. Meningkatkan kembali fungsi dan kemampuan pelayanan jalan yang kondisinya rusak dan rusak berat
9. Membuka akses daerah terisolir.
10. Menghubungkan lalu lintas barang/ orang di daerah terisolir
11. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan;

12. Terkendalnya potensi konflik air;
13. Terkendalnya pemanfaatan air tanah;
14. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat;
15. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan;
16. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut;
17. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat;
18. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan;
19. Tersedianya data dan system informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses
20. Tersedianya jaringan listrik di desa terpencil yang tidak terjangkau oleh PLN.
21. Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kumuh dan tidak layak huni.
22. Penurunan luasan kawasan kumuh
23. Terpenuhinya kebutuhan air bersih di Kabupaten Garut.
24. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.
25. Semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan faeces.
26. Meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air bersih.
27. Terciptanya tingkat penerangan yang optimal
28. Meningkatnya efek visual yang optimal dan pengarah visual yang jelas
29. Terciptanya sistem penerangan jalan umum yang efisien dan tepat
30. Terwujudnya poros jalan yang menghubungkan antar desa diselatan

3.2.4 Arah Kebijakan

1. Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Garut.
2. Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain, terutama melalui peningkatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
3. Membangun kembali kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat dan membangun kembali serta merehabilitasi infrastruktur yang rusak di wilayah-wilayah kritis dan rawan bencana.
4. Menyeimbangkan pertumbuhan wilayah melalui:
 - Peningkatan peran dan fungsi perwilayahan.
 - Memperkuat peran dan fungsi pelayanan kota-kota SWP.
5. Peningkatan pemahaman dan pelayanan serta informasi tenaga kerja sosial dan transmigrasi
6. Pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
7. Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air
8. peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.

9. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis
10. Pengendalian daya rusak air dalam penanggulangan banjir dengan mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
11. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
12. Peningkatan peran modal sosial dalam pengelolaan sumber daya air, untuk mendorong rasa memiliki masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.
13. Pengembangan kebijakan dan pengelolaan sumber daya air yang didukung dengan ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan.
14. Menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah terpencil dan perdesaan.
15. Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien.
16. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang Kabupaten Garut
17. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
18. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
19. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.
20. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan perumahan
21. Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air bersih dan air limbah dalam pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas kerja.
22. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah Rumah Tangga akhir tahun 2010.
23. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.
24. Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum.
25. Meningkatkan sistem penerangan jalan umum yang efisien dan tepat
26. Meningkatkan sistem penerangan jalan umum sebagai pengarah jalan
27. Meningkatkan efek visual yang optimal dan pengarah visual yang jelas

3.3 Memberdayakan Masyarakat dan Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaaan

3.3.1 Kondisi Umum

Bangkitnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki serta kepercayaan diri sendiri menyatu dengan hasrat yang besar mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam proses kehidupan sosial dan politik serta pembangunan daerahnya. Namun dalam realitasnya hingga saat ini peran serta stakeholders dalam kehidupan sosial politik serta pembangunan masih belum memadai. Hal ini terlihat dari masih rendahnya peran serta stakeholders pada saat public hearing suatu kegiatan untuk meminta saran. Padahal partisipasi aktif stakeholders terutama dalam bentuk kemitraan sinergis para stakeholders pada semua aspek pembangunan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal.

3.3.2 Isue strategis

1. Partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) bagi terbangunnya sistem kehidupan dan pemerintahan yang semakin demokratis, aspiratif, responsif dan akuntabel di Kabupaten Garut belum memenuhi harapan.
2. Pembangunan sosial masih dihadapkan pada masalah seperti kemiskinan, bencana alam, rawan sosial ekonomi, gejala disintegrasi sosial, yang berakibat pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya.

3.3.3 Sasaran

1. Terbangunnya landasan sistem pemerintahan yang baik dan didukung dengan kelembagaan yang mantap.
2. Peningkatan kerjasama antar daerah;
3. Terwujudnya kemampuan dan produktivitas yang tinggi para transmigran sebanyak 762 KK yang terintegrasi dengan masyarakat sekitar dan terbentuknya kerjasama antar daerah.
4. Meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dalam pembangunan serta meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
5. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan penyuluhan dan bimbingan sosial
6. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
7. Meningkatnya aksesibilitas orang sakit dan cacat terhadap pelayanan sosial dasar
8. Meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan dan kemauan serta taraf kehidupan sosial ekonomi Lanjut Usia.
9. Memberikan bantuan dasar dan jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang.

10. Meningkatnya pelayanan dan jangkauan informasi pada masyarakat
11. Meningkatnya kualitas baik teknis, SDM dan fasilitas lainnya
12. Terwujudnya pemerataan informasi secara luas dan menyeluruh sampai ke pelosok pedesaan
13. Terwujudnya 10 desa percotohan

3.3.4 Arah Kebijakan

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintah Kabupaten Garut didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah
3. Memperkuat tatanan masyarakat sipil (Civil society)
4. Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.
5. Pengerahan, persebaran dan mobilitas penduduk yang selaras, serasi dan seimbang dengan daya tampung lingkungan
6. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
7. Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial
9. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
10. Meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
11. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan penyandang cacat.
12. Mengutamakan fungsi pengembangan UKS disamping fungsi rehabilitas dan fungsi penunjang.
13. Mengembangkan sistem jaminan kesejahteraan sosial.
14. Meningkatnya layanan dan jangkauan informasi yang bermanfaat, efektif, efisien yang sesuai kebutuhan masyarakat yang erat dengan sektor-sektor pembangunan yang akan disampaikan kepada masyarakat
15. Meningkatnya kualitas teknis, SDM dan fasilitas lainnya yang mendukung terwujudnya pemerataan informasi secara luas dan menyeluruh sampai ke pelosok pedesaan yang secara geografis sulit ditempuh

3.4 Menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja

3.4.1 Kondisi Umum

Kabupaten Garut memiliki keunggulan letak geografis yang berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu daerah penyangga, kota Bandung dapat menjadi pasar potensial bagi Kabupaten Garut. Mengingat jaraknya yang relatif dekat dengan Bandung, diharapkan produk yang

dihasilkan Kabupaten Garut mampu bersaing dengan daerah lainnya. Lokasi yang strategis ini berimplikasi terhadap cepatnya arus informasi dari pemerintah propinsi yang dapat diserap. Informasi ini dapat berupa peluang untuk memperoleh investor, mengembangkan teknologi tepat guna, maupun membangun kerjasama, sehingga keuntungan untuk mempercepat pembangunan sangat besar. Selain itu Kabupaten Garut memiliki sumber daya alam dan peninggalan budaya dan peninggalan sejarah yang potensial untuk dapat dikembangkan untuk daerah tujuan wisata yang menarik dan kompetitif.

3.4.2 Isue strategis

1. Kualitas angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja lulusan SD ke bawah. Pada saat yang sama meningkatnya jumlah angkatan kerja lulusan SLTA dan PT tidak diimbangi oleh meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja yang sesuai dan pada gilirannya akan meningkatkan jumlah penganggur terdidik.
2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja
3. Tingginya inflasi pada tahun 2004 mencapai 7.7%.

3.4.3 Sasaran

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja / wirausaha sebanyak 2.000 orang.
2. Terlaksananya penerapan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja di 480 perusahaan.
3. Pencapaian UKM sama dengan KHM.
4. Meningkatnya peran atau fungsi kelembagaan Bipartit, Tripartit dan Lembaga Kesejahteraan Pekerja.
5. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan di dalam dan luar negeri.
6. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2006.
7. Menciptakan ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha
8. Meningkatnya ODTW
9. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pariwisata yang berbasis sapta pesona
10. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pelaku jasa usaha kepariwisataan
11. Tersedianya informasi tentang pariwisata
12. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

3.4.4 Arah Kebijakan

1. Keserasian dan kesepadanan pelatihan dengan kebutuhan pencari kerja.
2. Pembinaan kepada pengusaha dan pekerja untuk menumbuhkan kesadaran terhadap norma-norma ketenagakerjaan.
3. Memberikan sanksi kepada pengusaha dan pekerja yang melanggar norma ketenagakerjaan.

4. Menetapkan usia kerja di atas 15 tahun
5. Menanamkan jiwa kewirausahaan dan pencari kerja.
6. Mensosialisasikan peraturan ketenagakerjaan mengenai penempatan dan perluasan kerja.
7. Melanjutkan sistem padat karya.
8. Peningkatan perluasan kesempatan kerja
9. Peningkatan perlindungan tenaga kerja
10. Peningkatan penegakan norma-norma ketenagakerjaan
11. Peningkatan kesejahteraan pekerja
12. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku jasa usaha kepariwisataan
13. Peningkatan sarana informasi tentang pariwisata

3.5 Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

3.5.1 Kondisi Umum

Semenjak krisis ekonomi tahun 1998, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut dalam kurun waktu 2000-2004 rata-rata sebesar 3,65% pertahun. Kontribusi terhadap perekonomian yang paling besar adalah sektor pertanian yaitu sebesar 40,29%. Tetapi dari sisi penghasilan para petani merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas pertanian. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung, khususnya dari sisi pendapatan. Sektor ekonomi yang memiliki kontribusi kecil terhadap perekonomian namun menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dapat menjadi indikasi adanya tingkat kesejahteraan rendah pada penduduk yang bekerja pada sektor tersebut. Selain itu tingkat pendidikan/pengetahuan dan kesehatan dapat juga mengindikasikan aspek kesejahteraan. Kabupaten Garut memiliki produk-produk usaha kecil dan menengah yang sudah dikenal di pasar. Salah satunya adalah industri kulit. Ditinjau dari kontribusi UKM terhadap PDRB Kabupaten Garut ternyata sektor UKM menyumbangkan kontribusi yang tidak sedikit (kontribusi sektor perdagangan tahun 2003 dan 2004 masing – masing sebesar 30,85 % dan 29,86 %).

3.5.2 Isue strategis

1. Kegiatan ekonomi belum tumbuh secara signifikan yang antara lain ditandai oleh masih rendahnya investasi. Sejalan dengan kondisi ini penciptaan lapangan kerja pun berjalan lambat, sehingga upaya penurunan persentase penduduk miskin berjalan lambat.
2. Laju deforestasi meningkat cukup pesat sementara kemampuan merehabilitasi sangat jauh dari angka deforestasi tersebut. Demikian juga konversi lahan pertanian untuk penggunaan lain seperti pemukiman dan kegiatan industri semakin tidak terkendali yang setiap tahun diperkirakan 400 – 500 ha.

3.5.3 Sasaran

1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat
2. Pemangkasan prosedur perijinan investasi
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri
4. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku usaha dalam bidang manajemen dan teknik
5. Bertambah baik dan lengkap fasilitas yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas perindustrian.
6. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UKM
7. Proporsi terserapnya tenaga kerja tetap pada koperasi dan UKM meningkat bersamaan dengan bertambahnya tenaga kerja;
8. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi;
9. Terjaganya tingkat produksi beras di Kabupaten Garut untuk pengamanan terhadap pasar internasional;
10. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan di Kabupaten Garut;
11. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan;
12. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;
13. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.
14. Meningkatnya fungsi dan peranan pusat informasi pertanian dalam mengakses informasi dan peluang pasar serta dapat memberikan informasi potensi daerah secara optimal kepada pihak yang membutuhkan, serta berkembangnya inovasi teknologi pertanian dan kehutanan.
15. Meningkatnya swasembada pangan dan ketahanan pangan melalui penganekaragaman dan pemberdayaan pangan
16. Meningkatnya lahan untuk usaha perikanan melalui intensifikasi dan diversifikasi lahan usaha tani komersial dan pekarangan
17. Berkembangnya kegiatan agribisnis dibidang perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan/ nelayan dan membuka peluang kesempatan kerja
18. Terjalannya hubungan sinergis antar pelaku pembangunan peternakan yang disertai perbaikan tatalaksana dan mutu hasil
19. Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM

3.5.4 Arah Kebijakan

1. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi tinggi baik untuk tahapan memulai maupun tahapan operasi suatu bisnis;
2. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan (property rights), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (dispute settlement);
3. Memperbaiki kebijakan investasi;
4. Memperbaiki harmonisasi perda dan peraturan pemerintahan pusat terutama di dalam pengembangan (formalisasi) dan operasionalisasi usaha

di daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan.

5. Peningkatan kinerja daya saing industri secara berkelanjutan
6. Menjaga stabilitas ekonomi
7. Memperbaiki iklim usaha dan investasi yang sehat
8. Mengembangkan Koperasi dan UKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;
9. Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
10. Penguatan kelembagaan yang berhubungan dengan koperasi dan UKM;
11. Pengembangan UKM yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk makin berperan dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
12. Pengembangan UKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
13. Peningkatan kemampuan petani dan nelayan
14. Penguatan lembaga pendukungnya
15. Penguatan ketahanan pangan
16. Peningkatan produktivitas produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan
17. Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.
18. Peningkatan sistem budi daya pertanian yang dapat menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
19. Memacu daya saing produk unggulan dalam rangka meningkatkan nilai tambah
20. Pemantapan dan pengembangan sistem usaha agribisnis
21. Meningkatkan potensi pesisir dan pantai bagi kesejahteraan masyarakat
22. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang perekonomian
23. Memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan serta kehutan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan
24. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
25. Pengamanan dan perlindungan hutan dan lahan
26. Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.

3.6 Mempertahankan dan Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan

3.6.1 Kondisi Umum

Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, terutama yang disediakan alam, yang terus meningkat. Kecenderungan ini tercermin dari meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan tekanan terhadap keberadaan sumber daya alam. Hal ini akan menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (depleksi) sumber daya alam, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan kehidupan manusia.

Kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh penambahan penduduk yang pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan. Ketiga faktor tersebut akhirnya menyebabkan penerapan iptek lebih dimanfaatkan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga mengarah pada lingkungan sosial dan budaya, seperti kemiskinan, kelaparan, pelanggaran HAM, dan kepunahan nilai-nilai budaya masyarakat.

3.6.2 Isue strategis

1. Terjadinya penurunan kualitas (degradasi) dan kuantitas (depleksi) sumberdaya alam sebagai akibat negatif dari meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.

3.6.3 Sasaran

1. Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan illegal logging.
2. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan.
3. Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.
4. Berkurangnya pelanggaran dan perusakan sumber daya kelautan.
5. Meningkatnya kualitas air sungai
6. Berkurangnya pencemaran air
7. Terkendalinya kualitas air laut melalui pendekatan terpadu antara kebijakan konservasi wilayah darat dan laut
8. Membaiknya kualitas udara
9. Meningkatnya upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam manajemen persampahan untuk mengurangi beban TPA
10. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.
11. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan;

12. Terkendalnya potensi konflik air;
13. Terkendalnya pemanfaatan air tanah;
14. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat;
15. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan;
16. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut;
17. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat;
18. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan;
19. Tersedianya data dan system informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses
20. Meningkatnya jumlah sampah terangkut
21. Meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (environmental friendly)
22. Terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah
23. Meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematas air hujan
24. Berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75 persen dari kondisi saat ini.

3.6.4 Arah Kebijakan

1. Perbaiki manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam.
2. Optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya.
3. Penegakan hukum.
4. Rehabilitasi.
5. Pemulihan cadangan sumber daya alam.
6. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
7. Pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
8. Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air
9. peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
10. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis
11. Pengendalian daya rusak air dalam penanggulangan banjir dengan mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
12. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
13. Peningkatan peran modal sosial dalam pengelolaan sumber daya air, untuk mendorong rasa memiliki masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.

14. Pengembangan kebijakan dan pengelolaan sumber daya air yang didukung dengan ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan.
15. Pelayanan persampahan dan drainase yang berkualitas, terjangkau, efisien, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta berwawasan lingkungan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Menciptakan keadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase.
 - 2) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling-transportation maupun dalam pengelolaan TPA.
 - 3) Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan yang terkait
 - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan